

Kolaborasi Internasional: Dosen dan Mahasiswa IAIN Langsa Gelar PkM di Kamp Pengungsian Rohingya

Muhammad Firdaus¹, Zainal Muttaqin², Rahmad Safitri³, Muhammad Nur Ambia⁴,
Vika Okta Vianika⁵

Institut Agama Islam Negeri Langsa

mfirdaus@iainlangsa.ac.id¹
zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id²
rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id³
mnurambia04@gmail.com⁴
vionikavika7@gmail.com⁵

Submission	Accepted	Published
14 Juli 2025	16 Agustus 2025	16 Agustus 2025

Abstract

The humanitarian issues faced by the Rohingya refugees, such as limited infrastructure, low legal awareness, and lack of access to religious education, highlight the importance of educational intervention for refugees. The Rohingya refugee camp in Sungai Raya, East Aceh Regency, was chosen as the location for the Community Service Program (PkM) conducted by the Faculty of Shariah IAIN Langsa. The aim of this program is to provide education and spiritual guidance to children and legal counseling to adults, with the goal of increasing legal awareness, psychological resilience, and understanding of Islam. The method used was a participatory approach with a focus on two-way dialogue. The results of this activity showed an increase in participant engagement, particularly among children and adults, in educational programs, spiritual guidance, and legal counseling. Collaboration with external partners such as the International Organization for Migration (IOM) and Puspelkessos Panton Labu also contributed to the success of the program. Despite challenges such as language barriers and limited resources, this activity successfully had a positive impact on the refugees by enhancing their understanding of their legal rights and religious education. This program emphasizes the importance of flexibility and collaboration in providing interventions to vulnerable groups such as refugees, with a responsive and sustainable community service model.

Keywords: PkM, International Collaboration, Rohingya Refugees

Abstrak

Masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman hukum, dan kurangnya akses pendidikan agama, mendorong pentingnya intervensi edukatif bagi pengungsi.

Kamp pengungsian Rohingya di Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan bimbingan spiritual kepada anak-anak serta penyuluhan hukum kepada orang dewasa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, ketahanan psikososial, dan pemahaman keislaman. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan fokus pada dialog dua arah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan keterlibatan peserta, khususnya anak-anak dan orang dewasa, dalam program edukasi, bimbingan spritual dan penyuluhan hukum. Kolaborasi dengan mitra eksternal seperti International Organization for Migration (IOM) dan Puspelkessos Pantan Labu juga berkontribusi pada keberhasilan program. Meskipun ada tantangan seperti hambatan bahasa dan keterbatasan sarana, kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif bagi pengungsi dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum dan pendidikan agama. Kegiatan ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kolaborasi dalam memberikan intervensi kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti pengungsi, dengan model pengabdian yang responsif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PkM, Kolaborasi Internasional, Pengungsi Rohingya

Pendahuluan

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah menjadi sorotan tajam komunitas internasional dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Etnis minoritas ini berasal dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar dan telah lama mengalami diskriminasi sistemik serta kekerasan yang dilakukan oleh rezim militer (Kusuma & Sitorus, 2019). Perlakuan tersebut bukan hanya sebatas pengucilan, tetapi telah berkembang menjadi tindakan pengusiran paksa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Posisi mereka yang tidak diakui sebagai warga negara semakin memperparah kerentanan yang mereka alami (Sigit & Novianti, 2020). Dalam menghadapi kondisi ini, ratusan ribu warga Rohingya terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan mengungsi ke berbagai negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia guna mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.

Keberadaan mereka di negara-negara tujuan pengungsian, termasuk Indonesia, tidak serta-merta menjamin kehidupan yang lebih baik. Meskipun tidak lagi menghadapi kekerasan bersenjata seperti di tanah asal, para pengungsi Rohingya masih harus hidup dalam keterbatasan yang kompleks. Kamp-kamp pengungsian di wilayah Aceh, sebagai salah satu titik penampungan utama, masih jauh dari kondisi yang layak sebagai tempat tinggal. Para pengungsi hidup dalam kekurangan, baik dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, maupun kebebasan bergerak. Selain keterbatasan fisik dan sosial tersebut, tidak sedikit dari mereka yang mengalami trauma psikologis akibat pengalaman pahit yang dialami sebelumnya di negara asal mereka.

Kondisi tersebut menciptakan tantangan yang multidimensional dan tidak dapat direduksi menjadi isu kemanusiaan semata. Persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia mencakup dimensi sosial, hukum, dan kebijakan publik yang saling terkait erat. Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, berupaya menangani persoalan ini melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas isu menyebabkan upaya tersebut belum sepenuhnya

menjawab kebutuhan para pengungsi. Keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi, diperlukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan, pendampingan, dan pemberdayaan para pengungsi.

Dalam konteks inilah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu pendekatan strategis yang dapat diambil oleh perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman menghadirkan bentuk kontribusi konkret dalam mengusung nilai-nilai kemanusiaan sekaligus memperkuat solidaritas lintas batas. Program PkM ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial akademik terhadap kelompok rentan, khususnya para pengungsi Rohingya yang kini bermukim sementara di kamp pengungsian wilayah Aceh Timur. Kehadiran sivitas akademika IAIN Langsa dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban institusional, melainkan sebagai bagian dari panggilan moral untuk turut serta dalam diplomasi kemanusiaan.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya edukasi, bimbingan spiritual, dan penyuluhan hukum, yang diterima oleh pengungsi Rohingya di wilayah penampungan. Anak-anak pengungsi mengalami keterputusan dari pendidikan dan nilai-nilai moral, yang semestinya menjadi fondasi dalam tumbuh kembang mereka. Sementara itu, para pengungsi dewasa hidup dalam ketidakpastian hukum dan menghadapi masa depan yang tak menentu. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga menciptakan tekanan psikososial yang mendalam. Sayangnya, hingga saat ini belum ada intervensi sistematis yang secara komprehensif menjawab kebutuhan mereka, sehingga penderitaan yang dialami cenderung terus berlanjut.

Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, tidak mungkin penanganan pengungsi diselesaikan hanya melalui satu bidang keilmuan atau oleh satu institusi saja. Diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas disiplin, baik dari sisi akademik, praktis, maupun kebijakan. Hanya dengan sinergi semacam inilah krisis kemanusiaan seperti yang dialami pengungsi Rohingya dapat ditangani secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini tidak hanya menyasar komunitas lokal, tetapi juga komunitas transnasional yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, kondisi kamp pengungsian menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam penyediaan layanan dasar. Hal ini khususnya tampak pada kurangnya akses terhadap pendidikan dan konsultasi hukum. Banyak dari pengungsi yang tidak memahami hak-haknya, baik sebagai manusia maupun sebagai tamu yang saat ini berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, peran dosen dan mahasiswa hukum syariah menjadi sangat penting. Mereka dapat hadir sebagai fasilitator sekaligus penerang yang membantu menjelaskan berbagai ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku di Indonesia, termasuk Qanun sebagai hukum lokal di Aceh.

Data yang dirilis oleh UHNCR menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1000 pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai titik penampungan di Provinsi Aceh. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kejelasan mengenai masa depan jangka panjang, baik dalam aspek legalitas maupun integrasi sosial (CNN, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis kolektif yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kesenjangan pendidikan yang mereka alami juga menjadi persoalan serius, karena tidak semua kamp memiliki fasilitas belajar atau tenaga pengajar yang memadai. Fakta ini menegaskan urgensi intervensi yang bersifat edukatif dan pendampingan secara konsisten dan terstruktur.

Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi, bimbingan dan motivasi kepada anak-anak pengungsi Rohingya agar mereka tetap memiliki semangat belajar dan mempertahankan nilai-nilai agamis meskipun berada dalam kondisi hidup yang penuh keterbatasan. Diharapkan melalui kegiatan ini, akan tumbuh kepercayaan diri serta semangat religius yang mampu menjadi penopang psikologis dalam menghadapi realitas kehidupan yang sulit. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk penerapan Qanun di wilayah Aceh, kepada para pengungsi dewasa. Harapannya, para pengungsi tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga dapat menyesuaikan diri secara sosial dan hukum selama berada di wilayah Indonesia, guna menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.

Secara lebih luas, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk membangun kepekaan sosial dan kesadaran global di kalangan mahasiswa serta dosen terhadap isu-isu kemanusiaan lintas negara. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, peserta PkM tidak hanya menyalurkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengalami proses pembelajaran kontekstual yang memperkaya wawasan serta meningkatkan empati sosial. Hal ini penting dalam pembentukan karakter akademisi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap penderitaan manusia serta mampu memberikan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan.

Kegiatan pengabdian ini tidak dapat dipandang semata sebagai program rutin institusional, melainkan sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata dalam merespons kompleksitas persoalan pengungsi. Walaupun tidak menyelesaikan seluruh permasalahan, pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi mampu berkontribusi secara aktif dan strategis dalam isu-isu global. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan, seperti penyuluhan hukum, edukasi spiritual, dan bantuan sosial, merupakan bagian dari mata rantai panjang dalam upaya menyelesaikan krisis Rohingya di tanah pengungsian secara bertahap dan berkelanjutan.

Pengalaman langsung yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga internasional serta mitra lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mampu menjangkau kelompok yang termarginalkan dengan pendekatan yang humanis dan transformatif. Kerja sama seperti ini juga membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya di masing-masing lembaga dapat diatasi melalui sinergi yang dibangun berdasarkan kesamaan visi dalam membantu sesama manusia yang berada dalam kondisi darurat dan krisis.

Dalam kegiatan ini juga terkandung dimensi pemberdayaan yang menjadi muatan penting. Selain memberikan penyuluhan dan edukasi, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menumbuhkan rasa percaya diri para pengungsi, terutama anak-anak. Mereka diberikan ruang untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, serta menyalurkan aspirasi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan edukatif. Oleh karena itu, pengabdian ini membawa dampak psiko-edukatif yang positif terhadap kondisi kejiwaan mereka, sekaligus menanamkan harapan akan masa depan yang lebih baik di tengah keterbatasan yang mereka alami.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Aceh masih jauh dari optimal. Lubis et al. (2023) mengungkapkan bahwa sistem bantuan kemanusiaan yang ada belum mampu merespons secara efektif dinamika pengungsian Rohingya. Beberapa faktor mempengaruhi situasi ini antara lain ketidaksiapan infrastruktur, lemahnya pengawasan laut, serta kurangnya sikap tegas dari masyarakat lokal. Hal ini memungkinkan kapal asing masuk secara ilegal dan membuka celah bagi munculnya

jaringan perdagangan manusia. Ancaman yang timbul tidak hanya mengganggu kedaulatan negara dan keselamatan jiwa pengungsi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan hukum lokal.

Kajian lain menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan setara dengan praktik perbudakan modern. Di Indonesia, pengungsi Rohingya semakin rentan terhadap eksploitasi akibat minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya perlindungan hukum lintas negara. Banyak pengungsi menjadi korban eksploitasi yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia, dengan celah hukum dan lemahnya pengawasan, terutama di wilayah perbatasan dan jalur laut (Mulia, 2024).

Selain itu, penelitian yang menganalisis isu pengungsi Rohingya dari sudut pandang yuridis-normatif dan menyoroti pentingnya Indonesia untuk tetap mengedepankan prinsip non-refoulement yang terkandung dalam Konvensi Pengungsi 1951, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Kajian ini juga menunjukkan bahwa pengungsi di Aceh menghadapi keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar dan perlindungan hukum yang memadai. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa respons Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya masih memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk menangani permasalahan kemanusiaan yang kompleks ini (Pitaloka et al., 2024).

Dengan berlandaskan data dan hasil penelitian tersebut, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa memiliki urgensi yang tinggi dan relevansi yang kuat, khususnya dalam konteks edukasi, bimbingan spiritual dan penyuluhan hukum bagi pengungsi Rohingya. Pendekatan kolaborasi internasional yang diusung dalam kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek kemanusiaan dan advokasi hak asasi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Melalui kegiatan ini pula, peran institusi pendidikan tinggi dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan berperikemanusiaan dapat direalisasikan secara nyata. Pengabdian ini menjadi sarana penting untuk mempertegas posisi akademisi sebagai agen perubahan sosial dan pelopor solusi kemanusiaan. Dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, prinsip keadilan sosial, dan semangat kemanusiaan universal, kegiatan PkM ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat bersanding dengan aksi nyata dalam menjawab penderitaan umat manusia yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan pengungsi berperan aktif dalam proses identifikasi masalah dan penentuan bentuk solusi yang tepat. Pendekatan ini menggunakan strategi Participatory Action Research (PAR), yang menekankan pada dialog dua arah dan keberlanjutan program, sehingga bukan hanya transfer pengetahuan yang terjadi, tetapi juga pemberdayaan komunitas pengungsi itu sendiri.

Kegiatan ini dipusatkan di kamp pengungsian Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, yang dipilih berdasarkan urgensi kemanusiaan dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pengungsi di lokasi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola kamp, lokasi ini menampung sekitar 180 jiwa, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak (sekitar 70%). Keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pendidikan agama, dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan pengungsi menjadi latar belakang utama dipilihnya kamp ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PkM. Selain itu, tingginya

potensi kerentanan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia (*human trafficking*) mengharuskan hadirnya intervensi yang edukatif dan suportif dari lembaga pendidikan tinggi, seperti yang dilakukan oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Pelaksanaan kegiatan menggabungkan beberapa metode utama, yaitu kegiatan edukasi, bimbingan spiritual (keagamaan), dan penyuluhan hukum. Untuk anak-anak dan remaja, kegiatan difokuskan pada kegiatan edukasi dan bimbingan spritual. Sementara untuk orang dewasa, kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui ceramah dan tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketahanan psikologis mereka. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas sasaran yang memiliki keterbatasan bahasa dan latar belakang pendidikan, sehingga penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan kontekstual dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan visual.

Tahapan kegiatan dimulai dengan persiapan yang melibatkan koordinasi intensif dengan pihak pengelola kamp, mitra lokal seperti Puspelkessos Pantan Labu, serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Selain itu, dilakukan asesmen kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat dengan pengungsi serta petugas lapangan, untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi psikososial, spiritual, serta pemahaman hukum masyarakat pengungsi. Hasil dari asesmen ini kemudian digunakan untuk merancang dua bentuk kegiatan utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, yaitu edukasi dan bimbingan spiritual untuk anak-anak dan remaja, serta penyuluhan hukum dan penguatan psikososial bagi orang dewasa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 16–17 Juli 2024, dengan jadwal yang dibagi menjadi dua sesi utama. Hari pertama difokuskan pada anak-anak dan remaja, sementara hari kedua ditujukan untuk orang dewasa. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB, dengan pembagian waktu untuk sesi, istirahat, dan evaluasi harian. Tim pelaksana kegiatan terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, dengan dukungan tenaga lokal dan penerjemah bila diperlukan untuk mengatasi hambatan bahasa yang mungkin terjadi selama kegiatan. Materi disampaikan secara kontekstual dan interaktif, dengan penekanan pada pemahaman yang sederhana dan praktis agar mudah diterima oleh peserta.

Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa di kamp pengungsian Rohingya menunjukkan pencapaian yang signifikan, yang selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam bagian pendahuluan serta pendekatan metode pengabdian yang digunakan. Kegiatan ini meliputi tiga fokus utama, yaitu edukasi dan bimbingan spritual keislaman bagi anak-anak, serta penyuluhan hukum untuk orang dewasa, serta pengembangan kolaborasi dengan lembaga mitra dalam pemberian dukungan teknis dan logistik.

Dalam aspek edukasi keislaman, kegiatan berhasil menjangkau peserta dari kalangan anak-anak dan remaja pengungsi. Materi yang disampaikan mencakup doa-doa harian, kisah para nabi, dan pelajaran tentang adab Islami. Penyampaian materi dilakukan dengan metode yang menyenangkan dan kontekstual, seperti permainan edukatif dan hafalan doa sederhana. Pendekatan ini terbukti efektif berdasarkan observasi lapangan yang menunjukkan tingkat keterlibatan tinggi dari peserta, serta respons positif terhadap interaksi yang terjadi selama kegiatan.



Gambar 1. Kegiatan Edukasi dan Penguatan Spritual

Sementara itu, kegiatan penyuluhan hukum diberikan kepada orang dewasa terutama kepala keluarga. Materi yang disampaikan sejalan dengan perencanaan sebelumnya, antara lain prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, peraturan keimigrasian, serta Qanun Aceh yang berkaitan dengan hak-hak pengungsi, serta bahaya perdagangan manusia (*human trafficking*). Pendekatan diskusi dua arah memungkinkan peserta untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, khususnya terkait pendidikan anak, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan kependudukan. Keterlibatan aktif para peserta mencerminkan relevansi materi yang diberikan dengan kebutuhan nyata yang mereka hadapi.

Pencapaian yang memuaskan juga terlihat dalam aspek kolaboratif yang sejak awal telah dirancang untuk melibatkan mitra eksternal. Keterlibatan lembaga seperti International Organization for Migration (IOM) dan Puspelkessos Pantan Labu menunjukkan adanya sinergi lintas lembaga dalam pelaksanaan program. Diskusi lanjutan dengan mitra lokal juga membuka peluang pengembangan program advokasi hukum secara lebih berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai narasumber memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran kemanusiaan dan kompetensi akademik di kalangan generasi muda.

Meskipun menunjukkan capaian yang menggembirakan, pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Hambatan utama adalah kendala bahasa, terutama dengan anak-anak pengungsi yang belum menguasai Bahasa Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian bekerja sama dengan relawan IOM sebagai penerjemah dan mengembangkan pendekatan komunikasi visual dan nonverbal, seperti penggunaan gambar, bahasa tubuh, serta ekspresi wajah. Pendekatan ini terbukti membantu efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya berlangsung selama dua hari menjadi kendala dalam implementasi seluruh program. Namun, tim berhasil mengoptimalkan waktu yang ada melalui penyusunan agenda kegiatan yang padat dan sistematis.

Keterbatasan sarana pembelajaran seperti media edukasi dan alat tulis juga menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, tim pengabdian mampu mengantisipasinya dengan membawa perlengkapan secara mandiri dan melakukan improvisasi dalam penyampaian materi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, sesi-sesi diskusi dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas lingkungan kamp agar tidak mengganggu ketertiban yang ada. Hal ini mencerminkan prinsip adaptif yang menjadi bagian dari strategi metode pengabdian yang berbasis pada kondisi sosial setempat.

Refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh kuantitas capaian, melainkan juga kemampuan tim dalam merespons dinamika sosial dan budaya secara tepat. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi, serta catatan lapangan yang dibuat oleh mahasiswa yang terlibat. Evaluasi kualitatif diperoleh dari tanggapan peserta dan mitra

lokal, yang menunjukkan bahwa metode partisipatif dan interaktif telah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Respons positif peserta memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan telah mampu menjawab kebutuhan aktual yang mereka hadapi.

Kegiatan ini memberikan pengalaman transformatif bagi seluruh tim pelaksana, khususnya mahasiswa, dalam memahami kompleksitas pengabdian pada wilayah dengan konteks krisis kemanusiaan. Tantangan-tantangan yang dihadapi tidak hanya menjadi pembelajaran lapangan, tetapi juga memperkuat pentingnya fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan psikologis dalam menjalankan program di masa mendatang. Hasil evaluasi dan dokumentasi kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan model pengabdian yang lebih responsif dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti pengungsi.

Pembahasan

Etnis Rohingya merupakan kelompok Muslim minoritas yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Meskipun mereka memiliki sejarah panjang sebagai penduduk asli di wilayah tersebut, keberadaan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Myanmar. Hingga saat ini, Rohingya tidak dimasukkan ke dalam daftar 135 kelompok etnis yang diakui secara legal oleh negara, sehingga mereka menjadi kelompok *stateless* atau tanpa kewarganegaraan (Haque, 2017). Status ini berdampak langsung pada pembatasan hak-hak sipil, seperti hak atas kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. Ketidakberadaan mereka dalam kerangka hukum negara menjadikan komunitas ini terisolasi dan sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Penolakan pemerintah atas status etnis Rohingya tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga bentuk nyata dari marginalisasi yang sistematis dan berkepanjangan.

Fenomena *statelessness* yang dialami oleh Rohingya dapat ditelaah menggunakan teori identitas sosial, yang menjelaskan bagaimana pengakuan terhadap suatu kelompok etnis sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan politik yang dominan dalam masyarakat. Identitas suatu kelompok, dalam hal ini Rohingya, tidak terbentuk secara alamiah semata, melainkan melalui narasi dan kebijakan yang dikembangkan oleh negara dan institusi-institusi penguasa (Ahlina et al., 2020). Dalam konteks Myanmar, identitas Rohingya secara aktif ditekan dan disangkal melalui berbagai kebijakan resmi, termasuk penolakan dokumentasi legal serta penghapusan hak-hak dasar. Negara tidak hanya menolak mengakui mereka, tetapi juga membentuk opini publik melalui media dan kurikulum pendidikan yang menggambarkan Rohingya sebagai "pendatang ilegal". Proses ini membentuk realitas sosial yang semakin meminggirkan eksistensi dan legitimasi etnis Rohingya di mata publik dan negara (Maulana et al., 2023).

Akibat dari penolakan ini, diskriminasi terhadap etnis Rohingya menjadi semakin sistematis dan meluas, hingga memicu krisis kemanusiaan yang diakui oleh berbagai pihak internasional. Berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan global telah mengidentifikasi pelanggaran serius terhadap hak-hak Rohingya, termasuk pengusiran massal, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, serta pembakaran desa (Bhattacharjee, 2024). Krisis ini mencapai puncaknya pada tahun 2017, ketika ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh akibat kekerasan militer yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Dunia internasional menanggapi peristiwa ini dengan keprihatinan yang besar, dan beberapa negara serta lembaga internasional mengkategorikan perlakuan tersebut sebagai bentuk genosida. Namun, upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis ini masih menghadapi banyak hambatan, baik secara politik maupun hukum.

Kondisi yang menimpa Rohingya telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan, tidak hanya secara hukum, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Kehilangan kewarganegaraan membuat mereka sulit mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang memadai. Di pengungsian, banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan tidak manusiawi, tanpa jaminan masa depan yang pasti. Anak-anak Rohingya tumbuh dalam situasi tanpa kepastian hukum, pendidikan yang terbatas, dan trauma yang mendalam akibat konflik dan pengungsian. Tekanan psikologis ini semakin diperparah oleh ketidakjelasan status dan minimnya perhatian dari komunitas internasional terhadap solusi jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan untuk mengakhiri penderitaan komunitas Rohingya.

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya ke wilayah pesisir Aceh, telah berlangsung sejak 1 dekade terakhir dan terus berlanjut hingga kini. Banyak dari mereka melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar melalui jalur laut yang berbahaya, menempuh perjalanan panjang dengan perahu kecil dan seadanya (Panjaitan et al., 2025). Mereka mempertaruhkan nyawa demi harapan untuk menemukan tempat yang lebih aman dan bermartabat. Perjalanan ini sering kali berlangsung berminggu-minggu di lautan terbuka tanpa cukup makanan, air, maupun perlindungan dari cuaca ekstrem.

Walaupun Indonesia bukanlah negara yang menjadi penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, masyarakat Aceh justru menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap nasib para pengungsi Rohingya. Sikap solidaritas ini tercermin dalam tindakan nyata, seperti menyelamatkan mereka dari laut, menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, serta bantuan medis (Sunkudon et al., 2018). Kebaikan hati masyarakat Aceh telah mendapatkan pujian dari komunitas internasional karena mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan warisan budaya gotong royong yang kuat. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara warga, tokoh agama, dan relawan lokal. Dalam situasi darurat, semangat kemanusiaan seperti ini menjadi sangat penting untuk menjembatani kekosongan perlindungan hukum yang mungkin belum tersedia secara formal.

Keberadaan para pengungsi Rohingya di Aceh juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak ringan bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi logistik, fasilitas, maupun kapasitas lembaga lokal untuk menangani krisis pengungsi dalam jangka panjang. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih efektif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan internasional, dan organisasi lokal, agar perlindungan terhadap para pengungsi dapat diberikan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tanpa koordinasi yang memadai, upaya bantuan bisa menjadi tidak merata atau bahkan menimbulkan konflik sosial.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, khususnya Fakultas Syariah, memainkan peran penting dalam merespons krisis kemanusiaan yang dialami pengungsi Rohingya melalui pendekatan berbasis keilmuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk kontribusinya tampak dalam kegiatan bimbingan spiritual yang bertujuan membangkitkan ketenangan batin dan penguatan iman bagi para pengungsi yang menghadapi tekanan hidup yang berat. Selain itu, penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak mereka sebagai pengungsi, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Bentuk pengabdian ini bukan hanya menjadi sarana pemberdayaan bagi pengungsi, tetapi juga sekaligus mencerminkan

komitmen akademik IAIN Langsa dalam menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.

Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana penting untuk membangun empati dan kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan yang berkembang. Kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap realitas sosial yang kompleks. Tidak hanya memberikan manfaat bagi komunitas pengungsi, kegiatan ini juga memperkaya proses pembelajaran dengan pengalaman langsung di lapangan. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap kepedulian, kerja sama lintas budaya, dan kemampuan problem solving yang aplikatif. Dalam jangka panjang, pengalaman ini turut membentuk karakter sosial dan kepemimpinan yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, keilmuan lintas disiplin, serta jejaring kerjasama yang luas, perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang efektif. Institusi ini dapat mendorong terciptanya program pemberdayaan pengungsi yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, perguruan tinggi dapat menjembatani berbagai kepentingan demi menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pengungsi.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa di kamp pengungsian Rohingya menunjukkan peran nyata akademisi dalam merespons krisis kemanusiaan. Kegiatan ini tidak hanya berupa pemberian bantuan material, tetapi juga mencakup edukasi, bimbingan spiritual, dan penyuluhan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan pengungsi. Pendekatan ini membantu pengungsi memahami hak-hak mereka serta memperoleh ketenangan batin di tengah kondisi yang sulit, sekaligus menjadi sarana penerapan ilmu dan penguatan nilai kepedulian sosial bagi civitas akademika.

Anak-anak pengungsi Rohingya menghadapi trauma dan ketidakpastian yang mendalam, yang berdampak pada stabilitas emosional dan identitas spiritual mereka. Kegiatan bimbingan spiritual dan penguatan karakter menjadi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini. Ritonga (2024) menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis Islami dapat menguatkan sikap dan ketahanan mental pada anak-anak, yang sangat dibutuhkan dalam kondisi sulit seperti yang dialami para pengungsi. Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan dapat lebih kuat secara mental dan memiliki rasa identitas yang lebih jelas meskipun dalam keadaan yang penuh tekanan.

Bimbingan spiritual melalui bacaan doa dan cerita-cerita nabi menjadi sarana yang efektif untuk memberikan ketenangan batin kepada anak-anak. Bacaan doa mengajarkan mereka untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap keadaan, menguatkan keyakinan mereka bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Cerita-cerita nabi, yang mengandung nilai-nilai ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh harapan dan semangat. Dengan mendalami kisah-kisah tersebut, mereka diajarkan untuk percaya bahwa setiap ujian yang mereka hadapi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain itu, penguatan karakter melalui bimbingan spiritual juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai kebaikan dalam Islam, seperti tolong-menolong, kejujuran, dan disiplin. Kegiatan ini membantu mereka mengembangkan sikap positif yang tidak hanya penting untuk kehidupan di pengungsian, tetapi juga untuk masa depan mereka. Dengan membekali anak-anak dengan ajaran-ajaran tersebut, diharapkan mereka tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi yang penuh

tekanan, tetapi juga tumbuh menjadi individu yang kuat secara mental dan spiritual, siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan.

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya merupakan cerminan dari kegagalan komunitas global dalam menjamin hak dasar manusia bagi kelompok yang terpinggirkan. Di tengah keterbatasan kebijakan negara, solidaritas masyarakat sipil dan peran aktif institusi pendidikan tinggi seperti IAIN Langsa menjadi titik terang dalam upaya perlindungan dan pemulihan martabat pengungsi. Pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan nilai-nilai keilmuan, spiritualitas, dan kemanusiaan tidak hanya memberikan dampak nyata bagi para pengungsi, tetapi juga memperkaya pengalaman akademik sivitas kampus. Ke depan, dibutuhkan sinergi yang lebih luas antar akademisi, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan untuk menghadirkan solusi berkelanjutan yang menjunjung keadilan dan martabat manusia.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam memberikan solusi praktis bagi masalah sosial, khususnya di kalangan pengungsi Rohingya. Melalui pendekatan berbasis pendidikan agama dan penyuluhan hukum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pengungsi tentang hak-hak mereka dan memberikan ketenangan psikologis melalui pendidikan karakter berbasis agama. Temuan utama dari kegiatan ini adalah pentingnya partisipasi aktif komunitas sasaran dalam setiap tahapan, serta perlunya pendekatan sensitif budaya untuk memastikan efektivitas intervensi. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan ketahanan psikologis dan sosial, serta pemberdayaan melalui literasi hukum dan pendidikan agama.

Refleksi terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Signifikansi kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu dan komunitas pengungsi untuk mandiri dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Sebagai rekomendasi, penting untuk meningkatkan pelatihan pra-lapang bagi relawan dan mahasiswa yang terlibat, serta memperkuat sistem komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga internasional dan lokal dalam program-program pengabdian berikutnya. Pendekatan berbasis riset dan advokasi juga perlu dikembangkan untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang secara sinergis berperan dalam keberhasilan program ini. Pertama, apresiasi yang tinggi diberikan kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan dukungan moral dan material secara berkelanjutan. Bentuk dukungan ini tidak hanya berupa fasilitasi administratif dan pendanaan, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi pendidikan tinggi dalam mendorong pelibatan aktif akademisi dalam kegiatan kemanusiaan yang berbasis pengabdian.

Kontribusi penting juga datang dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) beserta mitra lokalnya, Puspelkessos Pantan Labu, yang telah menyediakan akses ke lokasi pengungsian dan mendampingi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Peran IOM sangat

strategis dalam menjembatani interaksi antara tim pelaksana PkM dengan komunitas pengungsi, serta menyediakan sumber daya lokal seperti penerjemah dan fasilitator yang sangat membantu dalam mengatasi hambatan bahasa dan budaya. Kehadiran IOM dan mitranya tidak hanya memperkuat legitimasi kegiatan di wilayah sensitif, tetapi juga memperluas cakupan dampak dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tak kalah penting, keterlibatan mahasiswa dan dosen sebagai peserta kegiatan PkM menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program. Mahasiswa berperan tidak hanya sebagai fasilitator lapangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menerapkan ilmu keislaman, hukum, dan komunikasi dalam konteks nyata. Dosen, sebagai pendamping akademik, membimbing proses pelaksanaan agar tetap berada dalam kerangka metodologis dan etis yang sesuai dengan nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. Kontribusi keduanya mencerminkan model *experiential learning* yang mengintegrasikan teori dan praktik secara simultan.

Referensi

- Ahlina, Y. R., Rezasyah, T., & Yulianti, D. (2020). Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 121–132. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.25465>
- Bhattacharjee, M. (2024). Statelessness of an Ethnic Minority: The Case of Rohingya. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1144493>
- CNN. (2023). *Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh?utm_source=chatgpt.com
- Haque, Md. M. (2017). Rohingya Ethnic Muslim Minority and the 1982 Citizenship Law in Burma. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(4), 454–469. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1399600>
- Kusuma, A. J., & Sitorus, F. E. M. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia dalam Kasus Krisis Kemanusiaan yang Dialami Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2017. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i2.1322>
- Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2023). Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 253–270. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.4224>
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya di Myanmar). *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.329>
- Mulia, S. H. D. (2024). Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pengungsi Rohingya di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(2), 85–98. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(2\).17901](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).17901)
- Panjaitan, E., Waruwu, R. C., Sofiano, R. B., Zila, C. I., & Sitorus, M. N. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum di Laut terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Honeste Vivere*, 35(1), Article 1. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.427>
- Pitaloka, D., Nugraha, L. G., Amalia, A. R., & Apriliana, A. N. R. (2024). Pengusiran Pengungsi Rohingya di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional dan Tantangan Hak

- Asasi Manusia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 114–123.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.176>
- Ritonga, N. (2024). Pengaruh Pendidikan Karakter Berbasis Islami Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi. *Komprehensif*, 2(2), Article 2.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8303>
- Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), Article 1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20205>